

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka pada bagian ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan tentang pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.1.1 Secara Umum

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat kota Serang Banten, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengaruh kesadaran politik warga negara memberikan pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

Hubungan tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji statistik koefisien korelasi sebesar 0,767 yang dikatakan signifikan dan termasuk pada kategori hubungan **kuat**. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi variabel yang mempengaruhi kesadaran politik, yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga, pengetahuan tentang fungsi, tujuan, dan proses pemilihan umum kepala daerah serta pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi.

5.1.2 Secara Khusus

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat kota Serang Banten, penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan dari tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Hubungan tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji statistik koefisien korelasi sebesar 0,640 yang dapat dikatakan signifikan dan termasuk pada kategori hubungan yang **kuat**. Artinya, jika pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara tinggi, maka akan tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah.
2. Pengetahuan tentang fungsi, tujuan, dan proses pemilihan umum kepala daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Hubungan tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji statistik koefisien korelasi sebesar 0,597 yang dikatakan signifikan dan termasuk pada kategori hubungan **cukup kuat**. Artinya, jika semakin tinggi pengetahuan warga negara tentang fungsi, tujuan, dan proses pemilihan umum kepala daerah maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah.

3. Pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Hubungan tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji statistik koefisien korelasi sebesar 0,629 yang dikatakan signifikan dan termasuk pada kategori hubungan **kuat**. Artinya, pengetahuan tentang jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap tingkat partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai berikut:

5.2.1 Pemerintah Pusat

Sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol yang mencakup implikasi terhadap legitimasi pemilihan, proses pemilihan dan pembiayaan. Oleh karena itu, pilihan terhadap sistem pemilihan umum kepala daerah seharusnya pemerintah pusat lebih memperhitungkan dengan cermat kecenderungan yang mempengaruhinya, termasuk bagaimana menyasikan kepentingan *elite* politik dan tuntutan masyarakat, serta tarik-menarik kepentingan antarelit dan antarkelompok masyarakat.

5.2.1 Pemerintah Daerah

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas legitimasi pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan bukti bahwa sistem politik dalam negara hanya dikerjakan oleh *elite* politik saja. Untuk menelaraskan masalah ini, pemerintah pusat atau pemerintah daerah seharusnya melakukan sosialisasi perundang-undangan yang baru kepada masyarakat terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan masyarakat di daerah. Media masa atau media elektronik bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dan sosialisasi yang efektif karena masyarakat selalu bersentuhan dengan media masa atau media elektronik tersebut.

5.3.1 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang digunakan karena rakyat tidak harus menintipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebageian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Oleh karena itu, rakyat harus diberikan informasi yang benar tentang calon yang hendak dipilih melalui kampanye yang efektif, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikutinya agar masyarakat dapat rasional baik dalam memilih calon maupun dalam menyikapi proses pemilihan umum kepala daerah. Pemilih yang rasional akan menghindari keputusan untuk memilih calon yang sama sekali tidak kompeten atau bahkan tidak bermoral. Oleh sebab itu, KPUD selaku pelaksana kegiatan pemilihan umum kepala daerah secara langsung menyediakan sistem kampanye yang efektif bagi masyarakat.

5.4.1 Pemerintahan Desa

Aparat pemerintah Desa yang berpungsi untuk melakukan sistem pendataan terhadap masyarakat hendaknya melakukan secara teliti dan benar, karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya diakibatkan oleh administrasi yang tidak tertib yang menyebabkan banyak anggota masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih tidak memperoleh katu pemilih. Oleh karena itu, agar pendataan dapat berjalan dengan tertib dan teliti, pendataan tersebut dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh pemuda, anggota karang taruna, para sukarelawan, dan para ketua RW dan RT yang siap terjun langsung kepada masyarakat.

5.5.1 Masyarakat

1. Partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuasaan. Dengan pemilihan umum kepala daerah secara langsung kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas karena pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin, kelompok marjinal, dan perempuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dengan cara memilih pemimpin yang memiliki komitmen membangun untuk bangsa.
2. Agar sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka segenap lapisan masyarakat yang ada di daerah atau pun masyarakat yang ada di perkotaan

hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap *elite* pemerintah yang telah terpilih dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

